

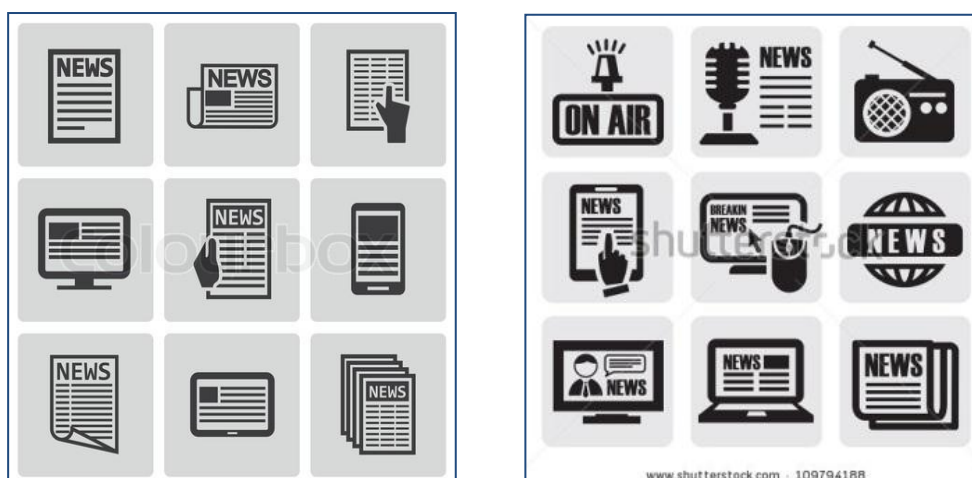


**Kementerian PPN/
Bappenas**

e-Newspaper Media Online

Ekonomi

Kamis, 28 Agustus 2014



**Pusat Data Informasi dan Rencana Pembangunan Nasional
Jakarta, Bappenas
2014**

Daftar Isi

1. KUOTA BBM SUBSIDI BAKAL JEBOL (*Media Online Republika*)
2. JOKOWI AJUKAN PERUBAHAN RAPBN 2015 (*Media Cetak Harian Ekonomi Neraca*)

Kuota BBM Subsidi Bakal Jebol

■ Aldian Wahyu Ramadhan,
Meiliani Fauziah

Rencana kenaikan harga BBM sudah ada dalam skenario APBN-P 2014.

JAKARTA — Kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terancam jebol pada akhir 2014 ini. Alasannya, Pertamina telah diminta oleh pemerintah untuk menghentikan kebijakan pengendalian distribusi BBM bersubsidi yang pada APBN-P 2014 telah dipatok kuotanya sebesar 46 juta kiloliter. "Diperkirakan jebol 1,35 juta kiloliter," kata Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Hanung Budyta, dalam keterangan pers, Rabu (27/8).

Menurut Hanung, Pertamina telah menerima instruksi dari pemerintah untuk menormalkan pasokan BBM bersubsidi ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Tujuannya untuk mengakhiri antrean panjang di banyak SPBU di daerah yang terjadi beberapa hari ini. Sebelumnya sejak 18 Agustus lalu, Pertamina mengurangi jatah harian BBM bersubsidi untuk tiap SPBU secara merata. Jatah Premium dikurangi lima persen dan solar 10-15 persen.

Berdasarkan data yang dimiliki Pertamina, jumlah kebutuhan rata-rata harian BBM bersubsidi jenis Premium dan solar selalu melebihi kuota yang telah ditetapkan APBN. Jika kebijakan pengendalian distribusi BBM

bersubsidi dihentikan, bisa dipatok kuota BBM bersubsidi tidak akan mencukupi prediksi kebutuhan masyarakat hingga akhir 2014.

Sebagai ilustrasi, kebutuhan rata-rata harian Premium sampai 31 Juli mencapai 81.132 kiloliter. Padahal, kuota Premium yang telah ditetapkan APBN-P 2014 adalah 80.240 kiloliter per hari.

Hanung menegaskan, apabila kuota BBM bersubsidi nantinya benar-benar jebol seperti yang diperkirakan, hal itu tidak lagi menjadi tanggung jawab Pertamina. Alasannya, Menko Perekonomian Chairul Tanjung telah

menginstruksikan Pertamina untuk tidak lagi melakukan pemotongan kuota BBM bersubsidi. Hanung mengakui, Pertamina belum mengetahui bagaimana skema pembayaran apabila realisasi kebutuhan BBM bersubsidi pada 2014 nantinya benar-benar melebihi kuota 46 juta kiloliter.

Untuk mengakhiri antrean panjang pembeli BBM di SPBU, Pertamina mulai Selasa (26/8) malam telah menambah pasokan Premium hingga 30 persen. Namun, tambahan pasokan hanya ditujukan pada SPBU-SPBU yang terjadi antrean panjang seperti di wilayah Pantura, Yogyakarta, dan Padang.

Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit mengatakan, rencana kenaikan harga BBM sudah ada dalam skenario APBN-P 2014. Menurut Ahmadi, beban anggaran pemerintah akan semakin berat jika harga BBM dinaikkan. Apalagi, belakangan Pertamina diminta untuk menghentikan pemotongan kuota BBM bersubsidi. "Kalau satu Agustus tidak dinaikkan, maka bebannya lebih besar," kata Anton.

Menko Perekonomian Chairul Tanjung menegaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak akan menaikkan harga BBM pada akhir masa jabatannya. "Tentu kalau harga BBM dinaikkan juga akan menjadi beban berat bagi masyarakat," kata Chairul, di Dili, Timor Timur, Selasa (26/8) malam. ■ e88 ed andri saubani

Indepth
Antrean di SPBU Masih Terjadi

Him-9

KONSUMSI > KUOTA*

Berdasarkan data yang dimiliki Pertamina, kebutuhan rata-rata harian Premium dan solar selalu lebih besar dari kuota yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2014. Tanpa pengendalian konsumsi seperti yang diinstruksikan pemerintah, Pertamina memperkirakan kuota solar bersubsidi bakal habis 6 Desember 2014, sementara Premium pada 27 Desember 2014



Ket. *Realisasi dan kuota rata-rata harian BBM bersubsidi
Sumber: Pertamina Pengolah; Aldian Wahyu Ramadhan

Rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak sudah ada dalam skenario APBN-Perubahan 2014

Hashtag Berita :

#KetahanEnergi #SubsidiBBM #APBNPerubahan2014 #KementerianPerekonomian

DENGAN ASUMSI PERTUMBUHAN 5,8%

Jokowi Ajukan Perubahan RAPBN 2015

Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengajukan perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 pada DPR. Yang ingin dikoreksi Jokowi terkait asumsi makro seperti pertumbuhan ekonomi dan rupiah.

■ NERACA

Anggota tim ekonomi Presiden-Wakil Presiden terpilih Jokowi-Jusuf Kalla (JK) Arif Budinanta, mengemukakan, pertimbangan perubahan asumsi makro RAPBN 2015 sudah diajukan Jokowi. Asumsi pertumbuhan dari 5,6 persen ingin dikoreksi menjadi 5,8 persen. "Kami sudah beritahu dengan Jokowi dan beres-beres mengawal anggaran 2015. Hari ini mulai dibahas di DPR soal RAPBN, Jokowi minta asumsi pertumbuhan 5,8 persen," kata Arif Budinanta yang juga merupakan anggota Komisi XI DPR RI.

Dasar konsep pertumbuhan itu, menurut Arif Budinanta. Karena Jokowi yakin pertumbuhan ekonomi 5,8 persen mampu ditangani program utama seperti pemangkasan birokrasi perizinan dalam investasi. Investasi akan didorong untuk industri antara, industri hulu, dan industri hilir. Hal ini untuk menekan ketergantungan impor bahan baku. Adapun sektor industri yang dilindungi adalah industri yang berbasis pengolahan sumber daya alam, seperti pangan dan pertambangan. "Yang didorong investasi masuk, bukan hanya untuk portofolio, tapi langsung investasi langsung ke sektor riil," ujar Arif.

Program untuk merangsang perizinan guna memacu investasi itu akan langsung dipacu pada tiga bulan pertama pemerintahan Jokowi-JK, atau sejak Oktober 2014 hingga Januari 2015. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,8 persen, negara diperkirakan akan mendapat penerimaan tambahan sebesar Rp2,6 triliun.

Selain koreksi asumsi pertumbuhan ekonomi 2015, Jokowi juga mengajukan perubahan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi Rp1.600 dari Rp1.500 per US\$. Koreksi ini untuk menekan inflasi sekaligus mengantisipasi dampak impor-tasi bahan baku yang diperkirakan masih akan berjalan pada masa-masa awal.

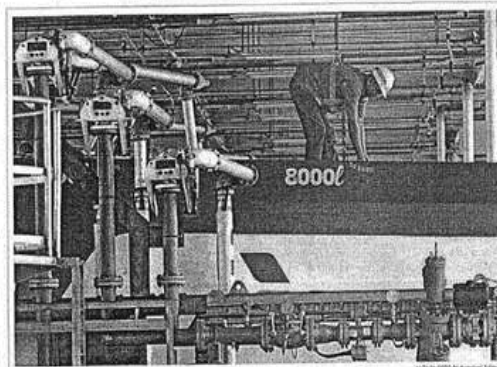
Dalam RAPBN 2015, Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menetapkan asumsi makro lain seperti inflasi 4,4 persen, suku bunga SPN 3 bulan 6,2 persen, harga KCP minyak 105 per US\$ per barel, lifting minyak 845 ribu per barel dan lifting gas 1.248 barel per hari.

Untuk kelangkaan ruang fiskal, Arif mengatakan, Jokowi belum mengajukan perubahan besaran defisit anggaran seperti yang telah dipatok Pemerintahan SBY sebesar 2,32 persen terhadap PDB atau yang senilai Rp 237,6 triliun.

Pembahasan RAPBN 2015 selanjutnya antara pemerintah dengan DPR dijadwalkan akan berlangsung pertengahan pekan ini. Sedangkan, pengesahannya menjadi APBN dijadwalkan akan dilakukan pada akhir September 2014.

Terlalu 'Pedet'

Sementara itu, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, dalam RAPBN 2015 sebesar Rp2.019,9 triliun sedangkan ekspektasi dari presiden baru pada pertumbuhan 7%, dolar yang bisa memebeskan angka di bawah Rp10.000 per dolar AS, melihat kondisi riil pe-



STOK BBM NASIONAL : Petugas menyiapkan pengisian BBM ke truk tanki di Terminal BBM Pertamina Plumpang, Jakarta, Rabu (27/8). PT. Pertamina (Persero) selaku badan usaha penyakur BBM berusaha memastikan selanjut stok BBM nasional yang dikelola Pertamina berada di atas 18 hari, juga memastikan ketersediaan BBM bersubsidi untuk masyarakat dengan melakukan normalisasi pasokan BBM tersebut.

riah mendingat terlalu optimis dan "pedet" dengan semua target-target yang akan dicapai. "Dengan target yang terlampaui tinggi pemerintah mendingat terlalu over dengan target makro ekonomi yang akan dikejar," katanya saat berbincang dengan Neraca saat acara diskusi Indef yang mengangkat tema "Perubahan Kreditabilitas Bagi Presiden dan DPR Baru," di Jakarta, Rabu (27/8).

Meski, sambung Enny saat ini semua tim ekonomi presiden terpilih memberikan masukan penunjan pertumbuhan ekonomi di angka 5,8%, itu pun masih terasa sulit melihat kondisi saat ini pertumbuhan ekonomi berada di level 5,1%. "Dan peyeksi kami sampai dengan akhir tahun hanya berkisar di angka 5,3%. 5,8% saja masih sulit, apalagi jika memang benar 7% yang diinginkan oleh

presiden terpilih kita," imbuh dia.

Karena apa, dengan post APBN 2015 yang hanya Rp 2.019,9 triliun tidak memberikan ruang fiskal yang lebar. Di samping itu, beban energi yang semakin tinggi. Karena, secara keseluruhan subsidi energi pada tahun 2015 bisa mencapai Rp400 triliun, beban subsidi BBM Rp300 triliun lebih, sedangkan untuk subsidi listrik mencapai Rp80 triliun. Belum lagi belanja rutin kementerian, gaji pegawai dan lainnya.

Sedangkan pendapatan dari pajak 2014 ini targetnya Rp1.110,2 triliun hanya setengah dari RAPBN 2015. Pendapatan negara lain belum bisa mumpuni sehingga memberikan ruang menambah utang luar negeri untuk menutupi defisit APBN nanti. "Pemerintah mendingat harus realistis melihat kondisi ekonomi

nasional secara menyeluruh," tegas Enny.

Menurut Enny, semua capaian bisa diraih jika memang pemerintah mendingat keserius terhadap sektor riil, baik industri maupun pertanian nasional. Jika pertumbuhan industri bisa di atas 7%, bisa memajukan pertumbuhan sektor pertanian bisa di atas 8% yang sekarang hanya 3,2%. Di samping itu, ada perampingan pengeluaran pemerintah seperti untuk kementerian, gaji pegawai untuk dilarikan ke belanja modal dengan memberikan kekhonggaran pada ruang fiskal. "Menang semua itu tidak mudah dicapai dengan isitan butuh proses, tapi jika pemerintah mendingat mampu menjalankan ini semua tidak mustahil target-target yang ditetapkan bisa teralisasi," tandas Enny.

Presiden terpilih mengajukan perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2015 pada DPR yang ingin dikoreksi, terkait asumsi makro seperti pertumbuhan ekonomi dan rupiah

Hashtag Berita :

#TransisiPemerintah #RAPBN2015 #RKP(RencanaKerjaPemerintah)